

Pengaruh Good Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021)

Dian Priatiningsih¹, Syafnita² Mella Mardayanti³, Fangela Myas Sari⁴, M. Trihudyatmanto⁵

^{1,2,3} Universitas Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, Jakarta, Indonesia

⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received: 20 November 2024

Revised: 20 Desember 2024

Accepted: 25 December 2024

KEYWORDS

Good Corporate Governance, Tax Avoidance, BUMN

CORRESPONDENSI

Nama: Dian Priatiningsih

Email: dian.unikal@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze Good Corporate Governance and Accounting Conservatism on Tax Avoidance (A Study on State-Owned Enterprises Listed on the Indonesia Stock Exchange in the Period 2017-2021). This research aims to verify the factors that impact the level of tax avoidance. The independent factors tested in this research include independent commissioners, audit committees, institutional ownership, and accounting conservatism. The dependent variable used is tax avoidance, which is measured using the cash effective tax rate (CETR). The research subjects consist of 8 state-owned enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of 2017-2021. The observation was conducted over 5 years. Purposive sampling method was used to select research samples, taking 40 samples based on specific criteria. The collected data was then analyzed using multiple linear regression model using SPSS software version 22. This research has been well designed, but the results of this research still have shortcomings and limitations so that further research is expected to use other methods such as the interview method to obtain honesty in respondents' answers, and the object can be further expanded. The results of this research indicate that independent commissioners and institutional ownership have no significant influence on tax avoidance, while audit committees and accounting conservatism have a negative influence on tax avoidance.

Pendahuluan

Pajak adalah unsur penting dalam penerimaan pendapatan negara. Penempatan pajak adalah salah satu kewajiban dalam bernegara, di mana masyarakat berpartisipasi untuk membantu pelaksanaan tugas negara yang dipegang oleh pemerintah. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih atau penerimaan pendapatan (Ubaidillah 2021). Peranan aktif dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak kepada negara, sesuai dengan Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 (Jamaludin Iskak 2021). SUMBAWA-Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menemukan dua perusahaan BUMN, yaitu PT. Nindya Karya (NK) dan PT. Brantas Abipraya (BA), tidak membayar pajak dengan benar. Selain itu, KPK juga menemukan delapan perusahaan di Kabupaten Lotim yang menunggak pajak terkait material Galian C. Kekurangan kontribusi dari sektor MBLB juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dinas ESDM NTB Trisman menyatakan bahwa sanksi administratif akan diberlakukan kepada dua BUMN tersebut oleh Dinsa Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumbawa, seperti surat teguran, pembekuan IUP, dan pencabutan IUP (Lombokpost.Jawapos.com 2022). Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan berbagai strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diizinkan dalam ketentuan perpajakan, serta memanfaatkan celah hukum (loopholes) yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku ([Mangunsong 2004](#)). Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun perilaku ini dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, tidak selalu ada sanksi hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak.

Di Indonesia merupakan negara hukum yang harus patuh akan hukum pajak atau perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pendapatan negara distribusi pajak bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif dari wajib pajak. Dan ini bersifat legal dengan para pelaku usaha dengan merekayasa, Jadi penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi pendapatan negara menjadi turun dan penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan dengan merekayasa laporan keuangan dan bisa juga merekayasa pendapatan bersih suatu usaha namun masih dalam tindakan yang legal.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara guna mensejahterakan Masyarakat dan negara dimana pengaruhnya atau imbalannya secara tidak langsung dan bersifat memaksa untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih negara dan meningkatkan nilai suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013) dalam ([Intansari, 2019](#)).

Pengertian penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (legal) Model penghindaran pajak kemungkinan sering terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan ([Lingga, 2012](#)). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan perundang-undangan

perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Chasbiandani & Martani, 2012) dalam (Intansari, 2019).

Penelitian ini mengkaji pengaruh tax avoidance dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk profitabilitas, leverage, good corporate governance, dan karakteristik eksekutif (Nugrahitha and Suprasto 2018). Faktor-faktor yang menarik untuk diteliti kembali adalah aspek Good Corporate Governance, yang melibatkan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, serta konservatisme akuntansi. Good Corporate Governance: Penelitian ini mengamati pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak, di mana komisaris independen adalah pemegang saham yang tidak memiliki afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan terkait. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar diharapkan dapat meminimalkan konflik antar agen. Ukuran Komite Audit: Ukuran komite audit, sebagai komponen penting dalam tata kelola perusahaan, tidak terbukti berpengaruh pada penghindaran pajak menurut penelitian sebelumnya. Kepemilikan Institusional: Faktor kepemilikan institusional, yang mencerminkan kepemilikan saham oleh institusi luar negeri, keuangan, berbadan hukum, dana perwalian, pemerintah, dan lainnya, juga tidak terbukti berpengaruh pada tax avoidance menurut penelitian sebelumnya. Konservatisme Akuntansi: Konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak menurut penelitian sebelumnya. Konservatisme akuntansi mencerminkan tingkat kehati-hatian dalam mengakui laba atau rugi dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan temuan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh Good Corporate Governance dan konservatisme akuntansi terhadap Tax Avoidance: studi pada perusahaan badan usaha milik negara (bumn) terdaftar di bursa efek indonesia periode Tahun 2017-2021."

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan eksplanatori untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan sebab-akibat dari beberapa variabel. Metode penelitian kuantitatif mengumpulkan dan menganalisis data dalam konteks populasi dan sampel tertentu. Pendekatan ini berdasarkan filosofi positivisme, yang menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumpulan data menggunakan instrumen yang mengumpulkan data, dan analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara variabel good corporate governance dan konservatisme akuntansi. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI, dimana laporan keuangan perusahaan diungkap kepada publik sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan untuk informasi yang valid. Variabel adalah atribut, sifat, atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang dapat mengalami variasi.

Peneliti menentukan variabel yang akan dipelajari dalam penelitian dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Operasionalisasi variabel memerlukan ketentuan seperti jenis, indikator, dan skala dari variabel-variabel dalam penelitian. Penelitian ini akan meneliti hubungan antara Good Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi, dan Tax Avoidance. Variabel dependen adalah Tax Avoidance, sedangkan variabel independennya meliputi Good Corporate Governance dengan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi.

a. Tax Avoidance

Variabel dependen adalah variabel yang terikat dan nilainya dapat berubah karena dipengaruhi oleh kelompok atau faktor lainnya. Pada penelitian ini, variabel dependen adalah penghindaran pajak (Tax Avoidance). Menurut beberapa peneliti, tax avoidance adalah usaha yang dilakukan dengan mematuhi persyaratan peraturan perpajakan yang berlaku dan menerapkan strategi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, perusahaan dapat menggunakan Cash Effective Tax Rate (CASH ETR), yaitu perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar nilai CASH ETR, maka tingkat penghindaran pajak cenderung lebih rendah. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah penghindaran pajak, dan CASH ETR digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.

Pembayaran Pajak

$$CASH ETR = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Komisaris Independen

Komisaris Independen mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak manapun di perusahaan dan komisaris independen wajib menjaga independensinya untuk mengawasi suatu Perusahaan (Sandy and Lukviarman 2008).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

c. Komite Audit

Peran dan tugas yang dimiliki komite audit yang penting dalam sebuah perusahaan dalam perannya yaitu memeriksa dan mengawasi semua kegiatan selama proses pelaporan

keuangan dan untuk melakukan pengendalian internal terhadap Perusahaan (Sarra 2017). Variabel Komite audit diukur menggunakan jumlah komite audit yang ada pada perusahaan.

Komite Audit = Jumlah Komite Audit

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam memantau, medisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan saham oleh pemerintah, investor, debitor, bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan investasi tidak termasuk kepemilikan individu (Khurana 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah presentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100$$

e. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah reaksi hati-hari dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko bisnis di masa depan. Konservatisme akuntansi dapat mencegah asimetri informasi dengan membatasi agen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan (Afriani 2019).

Hasil dan Pembahasan

A. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	40	,40	,60	,5225	,07675
Komite Audit	40	2,00	8,00	4,2250	1,74661
Kepemilikan Institusional	40	,51	,98	,6446	,13536
Konservatisme Akuntansi	40	,00	,57	,1950	,16512
Tax Avoidance	40	,05	6,04	1,0364	1,54452
Valid N (listwise)	40				

Berdasarkan tabel diatas, menejelaskan bahwa :

1. Variabel komisariss independen (X1) memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 0,40 nilai maksimum (terbesar) yaitu 0,60 dan mean (rata-rata) sebesar 0,5225. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 0,07675 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel komisariss independen, adalah sebesar 0,07675 dari 40 sampel yang digunakan.
2. Variabel komite audit (X2) memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 2,00 nilai maksimum (terbesar) yaitu 8,00 dan mean (rata-rata) sebesar 4,2250. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 1,74661 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel komite audit adalah sebesar 1,74661 dari 40 sampel yang digunakan.
3. Variabel kepemilikan institusional (X3) memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 0,51 nilai maksimum (terbesar) yaitu 0,98 dan mean (rata-rata) sebesar 0,6446. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah sebesar 0,13536 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,13536 dari 40 sampel yang digunakan.
4. Variabel konservatisme akuntansi (X4) memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 0,00 nilai maksimum (terbesar) yaitu 0,57 dan mean (rata-rata) sebesar 0,1950. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah sebesar 0,16512 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel konservatisme akuntansi adalah sebesar 0,16512 dari 40 sampel yang digunakan.
5. Variabel tax avoidance (Y) memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 0,05 nilai maksimum (terbesar) yaitu 6,04 dan mean (rata-rata) sebesar 1,0364. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 1,54452 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel tax avoidance adalah sebesar 1,54452 dari 40 sampel yang digunakan.

B. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar d Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,24079597
Most Extreme Differences	Absolute	,180
	Positive	,180
	Negative	-,097
Kolmogorov-Smirnov Z		1,136
Asymp. Sig. (2-tailed)		,152

Dari tabel diatas diperoleh hasil dengan nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov 0,152. Nilai signifikansi tersebut $0,152 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi normal.

b. Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Komisaris Independen	,923	1,084
Komite Audit	,945	1,058
Kepemilikan Institusional	,900	1,111
Konservatisme Akuntansi	,922	1,085

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dibawah angka 10 untuk setiap variabel. Nilai tolerance yang dihasilkan untuk variabel Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan Institusional, dan konservatisme akuntansi sebesar 0,923; 0,945; 0,900; dan 0,922. Nilai VIF yang dihasilkan untuk variabel Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan Institusional, dan konservatisme akuntansi sebesar 1,084; 1,058; 1,111; dan 1,085.

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolonieritas dan layak digunakan dalam penelitian ini. Karena hasil penelitian menunjukkan semua

nilai VIF dibawah 10 atau nilai tolerance diatas 0,10 berarti tidak terdapat gejala multikolonieritas pada model dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

			Komisaris Independen	Komite Audit	Kepemilikan Insititusional	Konservatisme Akuntansi	Unstan dardized Residual
Spearman's rho	Komisaris Independen	Correlation Coefficient	1.000	.076	.160	-.106	.128
		Sig. (2-tailed)	.	.641	.325	.517	.432
		N	40	40	40	40	40
	Komite Audit	Correlation Coefficient	.076	1.000	.070	-.123	.201
		Sig. (2-tailed)	.641	.	.668	.449	.213
		N	40	40	40	40	40
	Kepemilikan Insititusional	Correlation Coefficient	.160	.070	1.000	-.114	.045
		Sig. (2-tailed)	.325	.668	.	.483	.781
		N	40	40	40	40	40
	Konservatisme Akuntansi	Correlation Coefficient	-.106	-.123	-.114	1.000	.085
		Sig. (2-tailed)	.517	.449	.483	.	.601
		N	40	40	40	40	40
	Unstandar dized Residual	Correlation Coefficient	.128	.201	.045	.085	1.000
		Sig. (2-tailed)	.432	.213	.781	.601	.
		N	40	40	40	40	40

Menjelaskan bahwa nilai signifikansi variabel komisaris independent, komite audit, kepemilikan insititusional, dan konservatisme akuntansi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05.

d. Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,596a	,355	,281	1,30978	1,192

Maka didapatkan hasil sebagai berikut ini :

$n = 40$ (jumlah datanya) $d = 1,192$

$dL = 1,2848$

$dU = 1,7209$

$4-dL = 4-1,2848 = 2,7152$

$4-dU = 4-1,7209 = 2,2791$

Sehingga hasil menunjukkan bahwa $dU; 1,7209 < d; 1,192 < 4-dU; 2,2791$ yang artinya variabel bebas tidak terdapat autokorelasi.

C. Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,742	1,685		4,001	,000
	Komisaris Independen	-3,037	2,845	-,151	-1,068	,293
	Komite Audit	-,375	,124	-,425	-3,040	,004
	Kepemilikan Institusional	-2,820	1,633	-,247	-1,727	,093
	Konservatisme Akuntansi	-3,661	1,323	-,391	-2,767	,009

Berdasarkan tabel di atas menghasilkan model regresi berikut ini :

$$Y = 6,742 - 3,037X_1 - 0,375X_2 - 2,820X_3 - 3,661X_4 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda secara statistic dapat diartikan sebagai berikut :

a. Konstanta = 6,742

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel independen (komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi). Hal ini diartikan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka tax avoidance yang terjadi sebesar 6,742 atau 674,2%. Adapun penjelasan persamaan regresi dapat dilihat dari nilai koefisien dan signifikansi sebagai berikut : (a) Komisaris independen β bernilai -3,037 berarti setiap peningkatan variabel komisaris sebesar 1%, maka tax avoidance menurun sebesar -3,037 (303,7%); (b) komite audit β bernilai -0,375 berarti setiap peningkatan variabel komit audit sebesar 1%, maka tax avoidance menurun

sebesar -0,375 (37,5%); (c) Kepemilikan Institusional β bernilai -2,820 berarti setiap peningkatan variabel kepemilikan isntitusional sebesar 1%, maka tax avoidance menurun -2,820 (282%); (d) konservatisme akuntansi β bernilai -3,661 berarti setiap peningkatan variabel konservatisme akuntansi sebesar 1% maka tax avoidance menurun -3,661 (366,1%); (e) e = error.

Nilai besaran koefisien mempunyai nilai beta sebesar -3,037; hal ini menunjukkan apabila komisaris independen mengalami kenaikan satu-satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan menaikkan tax avoidance sebesar -3,037.

Nilai besaran koefisien mempunyai nilai beta sebesar -0,375; hal ini menunjukkan apabila komite audit mengalami kenaikan satu-satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan menaikkan tax avoidance sebesar -0,375.

Nilai besaran koefisien mempunyai nilai beta sebesar -2,820; hal ini menunjukkan apabila kepemilikan institusional mengalami kenaikan satu-satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan menaikkan tax avoidance sebesar -2,820.

Nilai besaran koefisien mempunyai nilai beta sebesar -3,661; hal ini menunjukkan apabila konservatisme akuntansi mengalami kenaikan satu-satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan menaikkan tax avoidance sebesar -3,661.

D. Uji Hipotesis

a. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32,992	4	8,248	4,808	,003 ^b
Residual	60,043	35	1,716		
Total	93,036	39			

Berdasarkan hasil output dari tabel diatas di atas, diketahui untuk uji ANOVA sebesar 0,003. Nilai sig < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut layak/fit dan tepat digunakan.

b. Uji T

Coefficients

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,742	1,685		4,001	,000

Komisaris Independen	-3,037	2,845	-,151	-1,068	,293
Komite Audit	-,375	,124	-,425	-3,040	,004
Kepemilikan Institusional	-2,820	1,633	-,247	-1,727	,093
Konservatisme Akuntansi	-3,661	1,323	-,391	-2,767	,009

Berdasarkan output diatas hasil pengujian hipotesis H1, H2, H3, dan H4 dengan uji T sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama H1/Komisaris independent (X1 terhadap Y)
Tabel menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,293 untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,293 > 0,05$ sehingga H1 ditolak, kesimpulannya bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
2. Pengujian hipotesis kedua H2/komite audit (X2 terhadap Y)
Tabel menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,004 untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,004 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa H2 diterima, yang berarti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
3. Pengujian hipotesis ketiga H3/kepemilikan institusional (X3 terhadap Y)
Tabel menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,093 untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,093 > 0,05$ sehingga H3 ditolak, kesimpulannya bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance
4. Pengujian hipotesis keempat H4/konservatisme akuntansi (X4 terhadap Y)
Tabel menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,009 untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,009 < 0,05$ sehingga H4 diterima, kesimpulannya bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Pembahasan

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*
Berdasarkan tabel 5.0 hasil analisis penelitian ini memperoleh t hitung untuk variabel komisaris independen sebesar -1,068 dengan signifikansi 0,293. Sedangkan nilai signifikansi t (sig-t) sebesar 0,293 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 (H1) ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikansi antara pengungkapan komisaris independen dengan tax avoidance. Komisaris independen mempunyai misi untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan tanggung jawab. Manajemen perusahaan melakukan upaya untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini disebabkan karena tugas dewan komisaris independen terbatas pada pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, sementara pihak manajemen yang secara langsung mengelola dan menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang sedikit atau banyak dalam suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dalam tata kelola perusahaan, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk mengarahkan manajer lain untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang maksimal

serta peningkatan kompetensi dan integritas dari semua pihak agar praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dapat berjalan dengan baik (Sarra 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Triyanti, Titisari, and Dewi 2020) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Tidak sejalan dengan penelitian dari (Ubaidillah 2021) bahwa komisaris independent berpengaruh negative terhadap tax avoidance dan hipotesis peneliti bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini dapat terjadinya dalam pembentukan komisaris independen pada perusahaan belum memperhatikan kompleksitas perusahaan pada akhirnya dapat membuat kinerja dari komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan perusahaan sehingga peran komisaris independent dapat menghalangi tindakan tax avoidance perusahaan (Triyanti, Titisari, and Dewi 2020)

Penghindaran pajak pernah di teliti oleh Midyastuty, (2017) perusahaan tetap tidak menerima manfaat pajak walaupun sudah melakukan pembiayaan pajak dan perusahaan lebih memilih hutang yang rendah untuk menghindari kesulitan keuangan. Dalam penelitian oleh di nilai walaupun membayar pajak secara rutin tetapi tetap tidak bisa menerima manfaat pajak secara langsung, sehingga perusahaan memilih hutang yang rendah untuk menghindari kesulitan keuangan. Kelemahannya hanya meneliti penghindaran pajak dalam struktur modal perusahaan.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini memperoleh t hitung untuk variabel komit audit sebesar -3,040 dengan signifikansi 0,004. Sedangkan nilai signifikansi t (sig-t) sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 (H2) diterima, yang berarti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Pada persyaratan Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan minimal komite audit wajib beranggotakan tiga orang. Jika jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka bisa meningkatkan pada tindakan manajemen dalam melakukan minimalisir laba untuk kepentingan pajak (Pohan 2008). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan kualitas good corporate governance (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tax avoidance. Komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Hal ini menunjukkan perusahaan yang mempunyai komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan mengawasi dalam segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diantari and Ulupui 2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Tidak sejalan dengan penelitian oleh (Sulistiyanti and Saputra 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sejalan dengan hipotesis peneliti bahwa

komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan di Indonesia telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG).

Dalam penelitian ini bisa diungkapkan dengan menghubungkan keilmuan perpajakan dengan keilmuan psikologi yaitu menganalisis potret psikologis sosial seseorang dan masyarakat seperti identifikasi sikap sikap seseorang yang memiliki kebiasaan penghindaran suatu kewajiban seperti kewajiban membayar hutang, membayar pajak dan hal lain yang dapat di analisis dengan adanya perubahan dan kebiasaan sikap psikologi sosial seseorang yang dapat mengarah pada hal yang negative seperti penghindaran pajak, dengan adanya penelitian tersebut bisa di kaitkan dengan metode analisis psikologi sikap seseorang sehingga dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan. Kelemahan yang ada pada penelitian tersebut yang dimiliki oleh bisa di katakan bahwa hanya menganalisis psikologi seseorang tanpa dengan adanya survey langsung ke responden yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan penipuan sehingga bisa dikatakan kurang lengkap tanpa adanya data survey ke responden (Stankevicius & Leonas, 2015).

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini memperoleh t hitung untuk variabel kepemilikan institusional sebesar - 1,727 dengan signifikansi 0,093. Sedangkan nilai signifikansi t (sig-t) sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 (H3) ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikansi antara pengungkapan kepemilikan institusional dengan tax avoidance. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis peneliti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian hal ini dapat terjadi karena kepemilikan institusional belum mampu mengontrol manajemennya untuk mencegah terjadinya tax avoidance. Hal tersebut dikarenakan bahwa tinggi rendahnya variasi tax avoidance tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional, karena para pemilik saham institusional cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan (Putranti and Setiawanta 2016). Lembaga pemilik saham mempercayai pengawasan dan pengelolaan perusahaan di dewan komisaris yang memungkinkan tindakan tax avoidance oleh manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Sulistiyanti and Saputra 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayu and Sumadi 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis pada penelitian ini yang menyebabkan ditolak karena kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak yang mulai tinggi, selain itu juga kepemilikan saham institusional berfungsi sebagai control yang baik terhadap tindakan manajemen perusahaan (Putranti and Setiawanta 2016).

4. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini memperoleh t hitung untuk variabel konservatisme akuntansi sebesar - 2,767 dengan signifikansi 0,009. Sedangkan nilai signifikansi t (sig-t) sebesar 0,009 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 (H4) diterima. Artinya terdapat pengaruh negatif antara konservatisme akuntansi dengan tax avoidance. Sesuai dengan teori konservatisme akuntansi yang merupakan sikap kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana tidak terburu-buru dalam mengakui kerugian dan segera mungkin mengakui laba yang mungkin terjadi (Hery 2017). Hal ini terjadi karena konservatisme akuntansi juga memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan karena perlambatan pengakuan pendapatan dan percepatan pengakuan biaya akan menunda pembayaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alvionita, Sutarjo, and Silvera 2021). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Tidak sejalan dengan hipotesis peneliti dan penelitian dari (Jumailah 2020) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Semakin perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan dengan mengecilkan laba maka pajak yang akan dikenakan juga akan semakin kecil.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Variabel independen yang diuji mencakup komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi, sementara variabel dependen diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR). Dari hasil analisis regresi linier berganda terhadap 40 sampel yang diperoleh melalui metode purposive sampling, ditemukan bahwa sebagian besar elemen GCG tidak memberikan dampak signifikan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Di sisi lain, komite audit ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance, menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang efektif dapat menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, konservatisme akuntansi juga berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, mengindikasikan bahwa pelaporan keuangan yang konservatif berperan dalam mengurangi intensitas penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini meliputi penggunaan data sekunder yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, serta belum digunakannya metode kualitatif seperti wawancara mendalam untuk memperkaya analisis. Penelitian di masa

mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan metode kualitatif dan memperluas cakupan objek penelitian ke sektor lain. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pengaruh GCG dan konservatisme akuntansi terhadap praktik penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Afriani, Nur. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi" 6 (1): 40–56.
- Intansari, M. R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Etika dan Lingkungan Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi)*. May, 106.
- Jamaludin Iskak, Thomas Felix,. 2021. "Pengaruh Profitability, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 3 (2): 588. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11706>.
- Khurana, Inder K & William J. Moser. 2010. "Institutional Ownership and Tax Aggressiveness *," no. 573: 0–42.
- Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Zenit*, 1, 210–221.
- Lombokpost.Jawapos.com. 2022. "Temuan KPK : Dua BUMN Ngutang Pajak Rp 46,3 Miliar." Lombokpost.Jawapos.Com. 2022. <https://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/30/06/2022/temuan-kpk-dua-bumn-ngutang-pajak-rp-463-miliar/#>.
- Mangunsong. 2004. "Uang, Perbankan, Dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)," 63–77. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=120330&lokasi=lokal>.
- Midyastuty. (2017). Penghindaran Pajak terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Core.Ac.Uk*, 37. <https://core.ac.uk/download/pdf/151521836.pdf>
- Nugrahitha, I Made Aditya, and Herkulanus Bambang Suprasto. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 22 (3): 2016–39.
- Sandy, Syeldila, and Niki Lukviarman. 2008. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19 (2): 85–98.
- Sarra, Hustna Dara. 2017. "PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN
- Stankevicius, E., & Leonas, L. (2015). Hybrid Approach Model for Prevention of Tax Evasion and Fraud. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 383–389.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.555>

Ubaidillah, Moh. 2021. "Tax Avoidance: Good Corporate Governance (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Terdaftar Di BEI 2015-2018)." *Owner* 5 (1): 152–63.